

## Pendidikan Multikulturalisme Era Kebangkitan Dunia Barat dan Kelahiran Modernitas

Awaludin Jamil<sup>(1)</sup>, Maskuri<sup>(2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup> [awaludinjamil1301@gmail.com](mailto:awaludinjamil1301@gmail.com) , <sup>2</sup> [masykuri@unisma.ac.id](mailto:masykuri@unisma.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini memberikan gambaran dasar mengenai kontroversi seputar multikulturalisme dan berbagai elemennya, tanpa menggali secara spesifik, untuk menggambarkan konteks masyarakat yang memunculkan pendidikan multikultural. Untuk mempromosikan wacana, tipologi pemahaman antarbudaya dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu deskriptif, normatif, dan raktik. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menyajikan pendidikan multikulturalisme era kebangkitan dunia barat dan kelahiran modernitas. Hasil dari kajian diklasifikasikan menjadi tiga bidang multikulturalisme. Tipologi pemahaman antarbudaya diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu multikulturalisme deskriptif, multikulturalisme normatif, dan multikulturalisme dalam praktiknya.

---

### Tersedia Online di

[http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset\\_Konseptual](http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual)

---

### Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-01-2024

Disetujui pada : 20-01-2024

Dipublikasikan pada : 31-01-2024

---

### Kata Kunci:

pendidikan multikulturalisme; era kebangkitan; modernitas

---

### DOI:

[http://doi.org/10.28926/riset\\_konseptual.v8i1.957](http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i1.957)

---

## PENDAHULUAN

Munculnya pendidikan multikultural bertepatan dengan tumbuhnya perdebatan multikulturalisme di Barat. Oleh karena itu, sulit untuk menyangkal keberadaan hubungan keduanya. Revisi kurikulum, terutama penyebaran literatur Barat dan undang-undang lainnya di Amerika Utara dan Eropa, yang dimulai pada akhir abad ke-20, merupakan contoh bagaimana multikulturalisme telah mempengaruhi bidang sosial, politik, dan khususnya pendidikan. Kontribusi kelompok budaya minoritas dan kurang terwakili dimasukkan ke dalam kurikulum, yang diubah dan diperluas dari sekolah dasar hingga pendidikan universitas. Amandemen tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki pandangan Eurosentris yang dianggap salah, yang memberikan penekanan yang tidak semestinya pada pencapaian kekuatan kolonial kulit putih Eropa dan meremehkan peran yang dimainkan oleh orang kulit berwarna dan masyarakat adat. Seiring dengan penyesuaian ini, kurikulum juga telah diperbarui untuk mencerminkan kontribusi yang diberikan oleh banyak kelompok etnis dalam berbagai profesi, sehingga memberikan bobot lebih pada informasi yang sebelumnya diabaikan (Eagan, 2020).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural dipengaruhi oleh ide atau konsep yang berasal dari multikulturalisme karena merupakan bagian integral dari perdebatan multikulturalisme di Barat. Karl Mannheim menggarisbawahi bahwa suatu gagasan, gagasan, atau pemikiran tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosiokultural di mana ia berasal. Seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami cara berpikir seseorang kecuali ia juga memahami konteks sosial di mana pemikiran tersebut berasal. Pandangan dunia (*weltanschauung/wordview*) yang mendasari suatu gagasan sangat penting bagi metodologi dalam hal ini (Mannheim, 1954). Oleh karena itu, untuk memahami isi pendidikan multikultural, seseorang harus mampu memahami wacana multikultural.

Artikel ini memberikan gambaran dasar mengenai kontroversi seputar multikulturalisme dan berbagai elemennya, tanpa menggali secara spesifik, untuk menggambarkan konteks masyarakat yang memunculkan pendidikan multikultural.

Untuk mempromosikan wacana, tipologi pemahaman antarbudaya dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu deskriptif, normatif, dan raktik. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menyajikan pendidikan multikulturalisme era kebangkitan dunia barat dan kelahiran modernitas.

## PEMBAHASAN

### Pendidikan Multikulturalisme

Kata sifat "*multikulturalis*" dan kata benda "*multikulturalisme*" keduanya berasal dari leksikon yang lebih baru dan baru digunakan pada tahun 1960an dan 1970an (Wieviorka, 2010). Istilah ini digunakan empat puluh kali di surat kabar besar Amerika pada tahun 1981 dan dua ribu kali pada tahun 1992, menurut temuan Glazer (Motani, 2001). Hal ini menunjukkan bagaimana keberagaman telah menjadi topik yang menonjol dalam filsafat Barat kontemporer.

Multikulturalisme adalah bidang yang kompleks dan kontroversial yang mencakup berbagai kebijakan dan praktik. Definisi yang muncul dari multikulturalisme arus utama bersifat ambigu dan dirasakan berbeda, tergantung pada, misalnya, pandangan politik seseorang. Istilah multikulturalisme, menurut Kymlicka, mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang masing-masing mempunyai tantangan tersendiri. Oleh karena itu, generalisasi mengenai tujuan atau konsekuensi multikulturalisme sangatlah menyesatkan (Wieviorka, 2010). Multikulturalisme memiliki banyak makna, dapat berupa kebijakan, program, praktik, pendekatan pendidikan, konsep sosiologi, simbol, cita-cita, ideologi, teori, atau gambaran masyarakat. Multikulturalisme bukan sekedar parade budaya dan festival seni etnik seperti yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang (Gingrich dan Christopher, 2002).

Karena "multikultural" dan "antar budaya" adalah istilah yang sering digunakan dalam tulisan tentang keragaman budaya, maka penting untuk memahami perbedaan di antara keduanya. Kebanyakan orang setuju bahwa mereka tidak sama, meskipun terlihat ada kesamaan. Perbedaan antara sebutan-sebutan ini tidak dibedakan secara langsung. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya dalam hal penggunaan sastra dan makna semantik. Jika "antar budaya" mengacu pada cara kontak atau pertukaran antar budaya atau sudut pandang budaya, "multikultural" mengacu pada keragaman budaya dalam lingkungan tertentu (Arasaratnam, 2013).

Karena seringnya saling dipertukarkan, pluralisme dan multikulturalisme adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian. Salah satu perbedaan utama antara pluralisme dan multikulturalisme adalah ada atau tidaknya kelompok budaya yang mendominasi di dalamnya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berbeda agama, kebangsaan, dan latar belakang budaya hidup berdampingan. Ketika kelompok minoritas secara aktif terlibat dalam masyarakat mayoritas, hal ini disebut sebagai pluralisme budaya (Hasa, 2020).

Heywood membedakan antara multikulturalisme normatif dan deskriptif sebagai dua definisi kata tersebut. Istilah multikulturalisme deskriptif menggambarkan keragaman budaya yang muncul ketika dua kelompok atau lebih dalam suatu komunitas berbagi gagasan dan praktik yang sama, sehingga menghasilkan rasa identitas kolektif yang unik. Dalam konteks ini, multikulturalisme diartikan sebagai keberagaman komunitas yang diakibatkan oleh perbedaan ras, etnis, atau bahasa. Multikulturalisme, sebaliknya, secara normatif dipahami mengandung arti dukungan positif berupa pengakuan dan toleransi terhadap keberagaman masyarakat. Inilah cara mereka mengakui peran nilai-nilai, keyakinan, dan pilihan gaya hidup dalam membantu orang dan komunitas mengembangkan rasa harga diri (Heywood, 2007). Untuk mencapai multikulturalisme, sebagian masyarakat dan pemerintah harus menerapkan kebijakan yang disengaja, terencana, dan terarah. Hal ini dikenal sebagai multikulturalisme normatif. Dengan menggunakan lensa sosiologi, Gingrich & Fries mendefinisikan multikulturalisme sebagai sarana membina hubungan yang

konstruktif dan bersahabat antara individu dan kelompok sambil mengatasi perbedaan (Gingrich and Fries, 2020).

### Tipologi Multikulturalisme

Karena istilah ini mungkin memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, beberapa ahli mencoba mengkategorikan multikulturalisme ke dalam banyak interpretasi. Sebagai contoh, Bloemraad (2011) mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis multikulturalisme: kebijakan publik, multikulturalisme demografis, dan multikulturalisme sebagai konsep politik. Mirip dengan Bloemraad, Calma (1996) mengklasifikasikan multikulturalisme ke dalam tiga kategori: gambaran demografis masyarakat di seluruh dunia, kumpulan standar, dan kebijakan resmi. Lebih lanjut, Eldering (1996) berpendapat bahwa untuk memahami multikulturalisme dalam masyarakat, perlu dilakukan pengelompokan ke dalam beberapa pengertian, seperti multikulturalisme sebagai: fakta obyektif, ideologi, kebijakan resmi, dan praktik sosial. Senada dengan Eldering, Dietlind Stolle dkk. (2016) berpendapat bahwa multikulturalisme diartikan sebagai:

- a. Kehidupan sosial yang menggambarkan keberagaman suku, agama, dan/atau budaya suatu penduduk;
- b. Sikap ideologis yang memandang keberagaman budaya sebagai sesuatu yang perlu dihargai dan diakui; dan
- c. Kumpulan undang-undang yang mengakui keragaman budaya sambil mencoba memperlambat proses integrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, tipologi multikulturalisme yang dikemukakan para ahli mengandung beberapa nama yang memiliki makna yang sebanding, seperti terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tipologi Multikulturalisme

Tipologi Multikulturalisme	
Heywood	Deskriptif Normatif
Bloemraad	Multikulturalisme demografis Filsafat politik Kebijakan publik
Calma	Deskripsi demografis masyarakat global Seperangkat norma Kebijakan pemerintah
Eldering	Realitas objektif Ideologi Kebijakan resmi Praktik sosial
Dietlind Stolle dkk	Deksripsi realitas sosial Ideologi Kebijakan publik

Sumber data: dipetakan dari pandangan Heywood, Bloemraad, Calma, Eldering, serta Dietlind Stolle, dkk.

Untuk mempromosikan wacana, tipologi pemahaman antarbudaya dikategorikan menjadi tiga bidang pada bagian ini. Kategori-kategori ini berasal dari tipologi yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya dan adalah sebagai berikut.

- a. Ada tiga jenis multikulturalisme: a. deskriptif (Heywood), yang mencakup multikulturalisme demografis (Bloemraad, Calma), atau, dalam kata-kata Eldering dan Stolle, realitas objektif;
- b. Normatif (Heywood), yang mencakup multikulturalisme sebagai ideologi (Eldering, Stolle), filsafat politik (Bloemraad), dan seperangkat norma untuk mengatasi keberagaman.
- c. Multikulturalisme dalam praktiknya. Multikulturalisme termasuk dalam kategori ini

ketika memanifestasikan dirinya sebagai kebijakan resmi, kebijakan pemerintah, atau kebijakan publik (Bloemraad), menurut Calma dan Eldering dan Stolle. Para lansia juga menambahkan keragaman dalam praktik sosial sebagai salah satu komponen dalam kategori ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga cara untuk mengklasifikasikan multikulturalisme, sebagaimana dibahas pada: deskriptif, normatif, dan praktis pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tipologi Pemaknaan Multikulturalisme

Multikulturalisme Deskriptif	Multikulturalisme Normatif	Multikulturalisme dalam Praktik
Multikulturalisme demografis sebagai	- Filsafat Poltik	- Kebijakan publik
realitas objektif masyarakat global	- Ideologi, seperangkat norma	- Praktik dalam realitas sosial

a. Multikulturalisme deskriptif

Multikulturalisme masyarakat global kita selalu dan akan terus dicirikan oleh apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai keragaman demografis atau deskriptif. Setidaknya suatu bangsa masa kini tidak dapat dianggap monokultural jika kekhasan budayanya dipahami dalam kaitannya dengan ras, etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan bentuk-bentuk kekhasan budaya lainnya. Akibatnya, terdapat sedikit perbedaan pendapat mengenai validitas multikulturalisme dari sudut pandang obyektif; para ilmuwan umumnya mengakui keragaman budaya sebagai ciri intrinsik masyarakat modern. Multikulturalisme, bagaimanapun, memperluas definisi budaya untuk tidak hanya mencakup paradigma budaya yang sudah ada sebelumnya (arus utama) tetapi juga sub-budaya. Tiga kelompok variasi budaya yang paling menonjol dalam paradigma multikulturalisme Bikhu Parekh (2008) adalah yaitu:

- 1) *Communal diversity* (keragaman komunal) mengacu pada beragam komunitas yang sadar diri, tertib, dan hidup berdampingan dengan berbagai sistem kepercayaan dan praktik, seperti komunitas gereja dan kelompok imigran.
- 2) *Perspectival diversity* (berbagai sudut pandang), terdiri dari sejumlah individu dalam komunitas yang berupaya menyuarakan kritik mereka terhadap prinsip-prinsip panduan dan cita-cita budaya dominan bersama dengan individu atau organisasi terkait. Misalnya, organisasi keagamaan yang meremehkan sikap sekuler dan kelompok feminis yang menentang prasangka patriarki yang sudah mendarah daging.
- 3) *Subcultural diversity* (Keanekaragaman subkultur mengacu pada orang-orang yang memiliki budaya dasar yang sama namun menjalani kehidupan yang relatif berbeda atau memiliki pandangan dan praktik yang beragam dalam bidang kehidupan tertentu. Misalnya, anak-anak tunawisma, orang tua tunggal, organisasi transgender, homoseksual dan lesbian, dan lain-lain.

Akibatnya, ketika kita berbicara tentang keragaman budaya dalam konteks multikulturalisme, kita tidak hanya berbicara tentang budaya besar (keberagaman komunal) namun juga tentang kelompok-kelompok kecil dalam budaya yang lebih besar yang telah mengembangkan karakteristik unik mereka sendiri seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, kelompok, serta kelompok marginal seperti warga kulit hitam Amerika, perempuan, kelompok LGBT, dan penyandang disabilitas (Song, 2017).

b. Multikulturalisme normatif

Multikulturalisme sebagai norma adalah cara normatif dalam melihat dan bereaksi terhadap realitas multikultural, atau, menggunakan terminologi Heywood, multikulturalisme normatif. Pengertian normatif multikulturalisme, baik yang

didasarkan pada nilai-nilai tertentu (budaya, agama, dll), termasuk dalam kategori ini. Ada beberapa klasifikasi yang berlaku terhadap wacana multikulturalisme normatif yang kini muncul, khususnya di Barat.

#### 1) Multikulturalisme sebagai Filsafat Politik

Multikulturalisme, adalah kata umum yang digunakan dalam filsafat yang berarti "memikirkan kembali monokulturalisme tradisi intelektual Barat". Konsep teoretis yang dikenal sebagai multikulturalisme dalam konteks ini menegaskan kesetaraan semua budaya, pada dasarnya menolak pembentukan hierarki di antara mereka dan menghapus perbedaan antara budaya "tinggi" dan "rendah". Pemikir postmodernis dan post-strukturalis seperti Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida, dan lainnya (2016) telah memberikan dukungan teoritis untuk gagasan ini.

Michael Murphy (2008) melihat multikulturalisme sebagai bidang filsafat politik yang menyelidiki hubungan antara kebebasan manusia, keragaman budaya, dan kesejahteraan sekaligus memberikan dukungan terhadap pemberian hak kepada anggota kelompok budaya yang terpinggirkan dalam lembaga politik dan hukum serta kebijakan publik. Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberagaman etno-budaya telah muncul sebagai isu utama, bahkan mendominasi, dalam filsafat politik. Banyak filsuf politik menanggapi dengan mengemukakan gagasan "multikulturalisme", dengan berpendapat bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh masyarakat multikultural memerlukan peninjauan ulang terhadap teori dan premis filsafat politik konvensional (Slijper, 2002).

Multikulturalisme adalah salah satu tema filsafat politik yang paling menonjol sejak akhir tahun 1980an (Loobuyck, 2005). Berdasarkan apa yang kita ketahui dari ulasan Kolombo mengenai perdebatan Barat seputar multikulturalisme pada tahun 1990an, para filsuf politiklah yang mendominasi diskusi-diskusi ini, semuanya dalam upaya untuk memberikan teori keadilan terpadu yang dapat menjelaskan keragaman budaya dan hak-hak kelompok. Sebagai sebuah filsafat politik, multikulturalisme merupakan ancaman terhadap universalisme, sebuah tradisi filsafat liberal yang menyatakan bahwa masyarakat adalah makhluk yang rasional, berkehendak bebas, dan hanya bisa benar-benar bebas jika hak-hak tertentu dijamin (Colombo, 2017).

Para multikulturalis menuduh liberalisme mempunyai tujuan mendasar yaitu homogenisasi atau pengabaian terhadap keberagaman. Multikulturalisme, di sisi lain, berpendapat bahwa individu harus diakui identitas budayanya sebagai anggota kelompok budaya tertentu selain menuntut perlakuan yang sama. Identitas budaya ini mendapat sedikit perhatian selama gerakan hak-hak sipil liberal. Di sisi lain, kaum liberal juga mengkritik multikulturalisme, dengan menyatakan bahwa multikulturalisme anti-universalistik dan anti-liberal, sehingga melemahkan tujuan Pencerahan. Dikatakan bahwa kaum multikultural memfasilitasi politik identitas kelompok budaya, yang secara paradoks menghambat asimilasi kelompok minoritas. Mereka melakukan hal ini dengan kedok "hak minoritas", yaitu hak yang diperoleh hanya atas dasar afiliasi dengan kelompok budaya tertentu dan dimaksudkan untuk melestarikan dan mempertahankan identitas budaya yang tidak sesuai dengan liberalisme (Loobuyck, 2005).

Alih-alih menekankan persatuan dan kesetaraan seperti yang dilakukan konsep-konsep liberal, sudut pandang multikulturalis justru lebih menghargai variasi dibandingkan konformitas. Karena hal ini mengasumsikan adanya pandangan yang tidak konsisten mengenai individu sebagai pribadi yang terpisah dari interaksi sosial, maka pengakuan terhadap hak-hak individu tidaklah cukup. Hanya dengan melakukan percakapan dengan orang lain dan merasa menjadi anggota kelompok yang spesifik dan unik, seseorang dapat mengembangkan identitas yang otonom dan percaya diri (Colombo, 2017).

Kaum liberal membela demokrasi liberal dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat berfungsi tanpa adanya warisan budaya bersama dan keterlibatan masyarakat yang kuat. Karena mengakui hak-hak kelompok akan

memisahkan masyarakat, mendorong 'gaya hidup paralel', melemahkan kesetiaan terhadap negara, membatasi kebebasan individu, dan melemahkan politik redistribusi, kaum liberal berpendapat bahwa politik perbedaan bertentangan dengan politik solidaritas (Loobuyck, 2005).

Multikulturalisme pada dasarnya memerlukan politik pengakuan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok etnis dan nasional minoritas harus diberikan pengakuan atas identitas budaya mereka serta hak khusus untuk mengekspresikan dan mempertahankan praktik budaya mereka. Oleh karena itu, politik dan budaya tidak boleh dipelajari secara terpisah. Di sinilah konflik muncul: politik secara aktif mencampuri budaya dalam multikulturalisme, sedangkan dalam liberalisme, politik dan budaya dianggap sebagai entitas yang berbeda. Menurut doktrin liberal, pemerintah harus tidak memihak dalam masalah budaya. "Budaya" adalah sesuatu yang hanya dimiliki dalam kehidupan pribadi. Charles Taylor, yang dikutip oleh Mennens, berpendapat bahwa gagasan ini tidak dapat dipertahankan karena tertanamnya budaya dalam politik dan Negara. Politik adalah aktivitas budaya tersendiri, yang sangat dipengaruhi oleh konvensi dan nilai-nilai. Karena budaya adalah salah satu komponen politik dan tidak ada perbedaan di antara keduanya, maka budaya tidak bisa begitu saja menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Ini adalah pemahaman postmodernis tentang hubungan antara kategori politik, ilmiah, seni, dan sosial. Adanya batasan yang kaku antar kategori yang sebelumnya dianggap sangat berbeda dipertanyakan oleh postmodernisme. Perhatikan perbedaan mencolok antara politik dan sains. Sains tidak pernah obyektif karena selalu dilihat dari sudut pandang orang-orang tertentu yang menganut norma dan keyakinan tertentu. Kategori-kategori menjadi hibrida dan bukannya kategori-kategori yang berbeda (Mennens, 2011).

Dalam upaya mendamaikan hak individu dan komunal, Willy Kymlicka mengajukan usulan substansial. Prinsip liberal mengenai kesetaraan, otonomi pribadi, dan kebebasan memilih penting bagi Kymlicka. Di sisi lain, hal ini menekankan pentingnya budaya dan afiliasi budaya. Karena budaya memberi penganutnya tujuan hidup dan menentukan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi mereka, partisipasi budaya sangatlah penting dan sulit untuk dikecualikan dari ideologi liberal. Rasa harga diri dan kepercayaan diri seseorang juga dapat dipupuk oleh norma dan praktik budaya. Agar masyarakat bisa bersikap adil, masyarakat harus mengakui nilai budaya minoritas dan menyediakan sarana bagi warganya untuk mempertahankan budaya tersebut dari dominasi mayoritas (Tejo, 2019).

Namun, tidak mungkin menerima semua permintaan pelestarian budaya secara liberal. Menurut Kymlicka, ada dua jenis klaim budaya: "perlindungan eksternal," di mana budaya minoritas berusaha melindungi diri dari pengaruh keputusan mayoritas, dan "pembatasan internal," di mana budaya minoritas berupaya membatasi hak-hak sipil dan sipil. kebebasan politik anggotanya untuk mempertahankan status quo, menghindari disintegrasi kelompok, atau menonjolkan perbedaan internal. Karena hal ini berkontribusi terhadap kemajuan kebebasan pribadi dan keadilan sosial, maka klaim "perlindungan eksternal" sepenuhnya konsisten dengan cita-cita liberal dan harus diakui. Faktanya, klaim "pembatasan internal" harus diabaikan (Colombo, 2017).

Menurut Colombo (2017), Jürgen Habermas berupaya untuk mengatasi isu kontroversial mengenai perlu atau tidaknya masyarakat umum menghargai identitas warga negara sebagai anggota kelompok budaya, agama, atau etnis tertentu. Haruskah hak khusus diberikan untuk mengakui identitas kolektif dalam negara hukum yang demokratis? Ia mengklaim bahwa ada situasi di mana hak atas kebebasan individu yang setara dan pelestarian identitas komunal tidak berbenturan. Ketika fokus pada "substansi" kebijakan multikultural digantikan dengan pemahaman "proseduralis" mengenai hak-hak yang mana prosedur demokratis harus secara bersamaan menjamin kedaulatan individu dan publik, ia

melihat potensi untuk mendamaikan dua nilai yang tampaknya tidak sejalan. Memungkinkan otonomi individu sebagai partisipan dalam kehidupan publik harus dibarengi dengan menjunjung tinggi kebebasan individu dan persamaan hak bagi semua orang. Persoalannya bukan pada jenis kebijakan yang harus diadvokasi, melainkan pada konsentrasi pada 'kondisi' di mana setiap warga negara, apapun latar belakang budayanya, dapat berpartisipasi dalam merumuskan seperangkat peraturan bersama yang wajib secara hukum. Masyarakat multikultural yang adil tidak perlu mematuhi serangkaian standar dan peraturan yang ditetapkan secara hukum. Sebaliknya, hal ini merupakan hasil dari "patriotisme konstitusional", sebuah komitmen publik yang memberikan pengakuan kepada seluruh anggota masyarakat dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Seyla Benhabib (2002) yang pertama kali mengemukakan gagasan menyatukan keberagaman dan liberalisme. Tiga persyaratan berikut harus dipenuhi agar tradisi budaya dan agama dapat diterima dan cita-cita liberal dapat segera diatur:

- a) *egalitarian reciprocity*, yang saya maksud adalah adanya kesetaraan di kedua sisi. Di dunia mana pun, anggota minoritas dalam bidang bahasa, budaya, agama, atau status lainnya tidak boleh mempunyai hak sipil, politik, ekonomi, atau budaya yang lebih rendah dibandingkan mayoritas.
- b) *voluntary self-ascription*. orang tidak boleh dikelompokkan berdasarkan tempat asalnya ke dalam kelompok bahasa, budaya, atau agama tertentu. Keanggotaan dalam suatu kelompok harus memberikan jangkauan seluas-luasnya terhadap anggapan diri dan identifikasi diri.
- c) *freedom of exit and association*, kebebasan berserikat dan berangkat. Hak untuk memilih dan beralih antar kelompok harus terbuka bagi individu.

Inti dari konsep Benhabib adalah penerimaan terhadap keragaman budaya, gagasan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan tidak adil karena latar belakang budayanya, dan gagasan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk secara bebas memilih budaya mana yang menjadi dasar identitasnya, bahkan jika mereka memutuskan untuk melakukannya. berpindah dari satu ke yang lain. Disini menandakan bahwa identitas budaya seseorang merupakan sesuatu yang dipilihnya secara sadar, dan disinilah nilai-nilai liberal dijunjung tinggi. Hal ini bukanlah sesuatu yang bawaan dalam diri seseorang berdasarkan asal usul, latar belakang etnis, agama, tradisi, dan sebagainya. Seorang perempuan Muslim di negara sekuler, misalnya, mempunyai hak untuk mempertahankan identitas keislamannya, seperti dengan mengenakan jilbab, dan hal ini tidak boleh menghilangkan hak-hak sipil yang sama seperti yang dialami anggota kelompok mayoritas. Dia tidak boleh dipaksa untuk menggunakan sifat-sifat Islami hanya karena dia seorang wanita Muslim; sebaliknya, dia mempunyai kebebasan untuk menolak melakukan hal tersebut. Sebagai individu, ia bebas bergaul secara bebas dengan budaya apa pun yang ia pilih. Hal ini menjadi contoh bagaimana multikulturalisme dan liberalisme dapat hidup berdampingan dan tidak bertentangan.

Sebagai sebuah teori politik, multikulturalisme pada akhirnya mengkritik liberalisme di Barat, khususnya liberalisme klasik, yang mengutamakan kebebasan pribadi di atas keragaman budaya. Keyakinan dasar liberalisme klasik mencakup keadilan individu, yang menyatakan bahwa orang harus diperlakukan berdasarkan sifat individunya dan bukan keanggotaannya dalam kelompok tertentu, dan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Sebaliknya, multikulturalisme mengupayakan kesetaraan yang lebih besar antar kelompok, mengakui keragaman budaya, dan didasarkan pada gagasan keadilan sosial. Negara demokrasi liberal menghadapi ancaman multikulturalisme. Setiap orang dalam demokrasi bebas berhak atas perlindungan hukum yang sama karena kita semua memiliki identifikasi abstrak yang sama sebagai "warga negara" terlepas dari status sosial, budaya, politik, atau ekonomi kita yang sebenarnya (Gale and

Christian, 2019).

## 2) Multikulturalisme sebagai Ideologi (Wacana Kritis, Anti-ideologi)

Dalam *International Journal of Intercultural Relations* (1991), penilaian Arasaratnam terhadap literatur multikulturalisme selama 35 tahun mengungkapkan kesepakatan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ide dan kebutuhan praktis. Kebijakan multikultural yang diformalkan memudahkan politisi untuk memaksakan ideologi mereka pada isu-isu dunia nyata. Multikulturalisme dapat dilihat sebagai kumpulan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menangani keragaman budaya dan sebagai filosofi preskriptif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ideologi dan kebijakan multikultural secara independen ketika menilai perspektif individu atau organisasi terhadap keberagaman (Arasaratnam, 2017). Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme merupakan cerminan dari serangkaian keyakinan yang lebih luas yang mengarahkan konsepsi masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan "masyarakat yang baik". Dalam setting ini, rasisme dan multikulturalisme dibandingkan Staerkle, 2005).

Ideologi multikulturalisme mengusulkan bahwa keanggotaan kelompok tidak hanya diakui tetapi juga dihormati untuk mengakomodasi keberagaman dan mencapai kesetaraan. Multikulturalisme mengacu pada penerimaan berbagai budaya dalam suatu masyarakat serta dukungan aktif terhadap perbedaan budaya tersebut baik oleh anggota kelompok mayoritas maupun anggota kelompok minoritas. Ideologi multikulturalisme merupakan harapan ideal dalam kehidupan bermasyarakat (tingkat masyarakat) yang sesuai dengan strategi integrasi-akulturasi setiap individu (*individual-level*) (Hui, 2015).

Ideologi multikulturalisme mirip dengan postmodernisme (Mclaren, 1993) atau wacana kritis lainnya yang bertujuan untuk melemahkan universalisme (Anthias, 2002), yang sudah tertanam dalam warisan Barat kontemporer, seperti feminisme. Cita-cita dan perwujudan keberagaman budaya yang diwakili oleh identitas sosial yang beragam secara budaya disahkan oleh multikulturalisme (Gutmann, 2015). Ideologi multikulturalisme bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman melalui multikulturalisme (Moodley, 1983).

Gerakan dekolonisasi dan pemikiran pasca-kolonial telah mengkritik universalisme sejak tahun 1960an dan khususnya tahun 1970an karena, dalam praktiknya, universalisme menyembunyikan perilaku dominasi dan eksploitasi. Wieviorka berpendapat bahwa dakwaan yang kuat terhadap universalisme ini memberikan tambahan teoretis yang baru dan signifikan terhadap "debat multikultural" (Wieviorka, 2017). Dalam diskusi ini, teori feminis, postmodernisme, dan teori sosial radikal semuanya berperan penting. Semua pendirian teoritis ini, meskipun dengan cara yang berbeda, menentang universalisme yang mengutamakan situasi, variabilitas, dan kontingensi sosio-historis. Hal ini juga memicu perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan "kanon" dan penghapusan radikal dominasi laki-laki kulit putih; lebih jauh lagi, mereka dengan tajam mengkritik Eurosentrisme dan masyarakat patriarki. Asumsi bahwa masyarakat dan kelompok mempunyai identitas tunggal yang tidak berubah dan bahwa negara mempunyai prinsip-prinsip universal juga telah dirusak oleh globalisasi ekonomi dan budaya saat ini serta fenomena migrasi (Colombo, 2017).

Gilroy menghubungkan kesenjangan budaya dan prasangka dengan kolonialisme, menurut profesor University College London dan kepala Pusat Studi Ras dan Rasisme. Multikulturalisme politik, menurutnya, selama ini cenderung memperlakukan perbedaan budaya sebagai 'anugerah alami', dan bukan sebagai konsekuensi dari kekuasaan dan kekerasan yang sebenarnya. Kekuasaan dan kekerasan, keduanya merupakan warisan masa kolonial, merupakan faktor utama terbentuknya perbedaan etnis. Keberagaman etnis dan agama dipandang sebagai 'anugerah alami' oleh multikulturalisme politik saat ini, yang mengabaikan proses kekerasan yang menimbulkan perbedaan tersebut (Gilroy, 2018).

Mengakui perbedaan bukan satu-satunya aspek multikulturalisme; hal ini juga melibatkan pengenalan akan keberadaan stereotip "orang lain". Sebagai alternatif, ia secara kritis mengkaji bagaimana hegemoni laki-laki kulit putih dan supremasi laki-laki kulit putih dibangun pada tingkat sosial dan politik. Isu aktual yang ada dalam diskusi multikultural bukanlah pengakuan identitas atau dukungan terhadap hak-hak kolektif; sebaliknya, hal ini menyingkap fondasi dominasi (kulit putih, laki-laki). Dalam hal ini, multikulturalisme menantang praanggapan yang tidak terlihat dan dianggap remeh yang menentukan hak istimewa, kekuasaan, dan alokasi hak serta rasisme (Colombo, 2017).

Dari sudut pandang sejarah, multikulturalisme merupakan upaya untuk menafsirkan kembali dinamika kekuasaan antara banyak orang dan identitas politik yang terus berkembang. Hal ini lebih kompleks daripada produk interaksi antar kelompok budaya yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas (Colombo, 2017). Multikulturalisme menekankan bagaimana konstruksi sosial membentuk budaya dan identitas tertentu dan berpendapat bahwa konteks dan kekuasaan sejarah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap budaya dan identitas dibandingkan seleksi alam atau keturunan. Multikulturalisme pada hakikatnya adalah anti-ideologi, jika ideologi dianggap sebagai komponen legitimasi otoritas kelompok atau kelas sosial dominan, seperti yang dikatakan Eagleton. Kapasitas untuk memperoleh kekuasaan, yang merupakan landasan seluruh eksistensi sosial, merupakan kekuatan dari kata ideologi. Misalnya, di Australia, permasalahan etnis telah menjadi titik fokus konflik kelas, dan menjadi alat kelas penguasa untuk semakin memperkuat konservatisme dan dominasi kelas dengan memecah-belah kelas pekerja (Jakubowicz, 1981). Lebih jauh lagi, kelas pekerja telah mengadopsi multikulturalisme sebagai filosofi panduan, baik disengaja atau tidak. Tujuan multikulturalisme adalah untuk menghilangkan kepercayaan (ideologi) tentang maskulinitas, supremasi kulit putih, superioritas ras tertentu, budaya Barat, dan kelompok yang selama ini mengambil keuntungan dari terbentuknya kekuasaan peninggalan masa kolonial.

#### c. Multikulturalisme dalam praktik

Multikulturalisme dalam praktiknya, berbeda dengan multikulturalisme deskriptif, menggambarkan realitas objektif implementasi multikulturalisme normatif dalam kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat, berlawanan dengan realitas kodrat manusia yang multikultural (Clayton, 2009).

Menurut Ommundsen, Jon Stratton membedakan antara "multikulturalisme sehari-hari", yang merupakan pengalaman aktual dari keragaman budaya, dan "multikulturalisme resmi", yang merupakan gagasan yang dicita-citakan oleh para pembuat kebijakan pemerintah. Jika multikulturalisme sehari-hari menekankan perbedaan individu dalam tema kesamaan manusia yang lebih luas, maka multikulturalisme resmi didasarkan pada konsep perbedaan kelompok. Perbedaan antara multikulturalisme "dari bawah" dan multikulturalisme "dari atas" inilah yang dimaksud oleh Kymlicka (Ommundsen, 2000). Berbeda dengan multikulturalisme "dari atas", yang melibatkan negara yang mengatur keberagaman dan menyusun kebijakan yang mendorong multikulturalisme, multikulturalisme "dari bawah" berfokus pada multikulturalisme sebagai perdebatan politik yang terjadi di komunitas lokal. Multikulturalisme "dari bawah" dapat diartikan sebagai multikulturalisme sehari-hari yang berakar pada pertarungan politik dan realitas sehari-hari kelompok etnis dan ras (Kymlicka, 2015).

Cara penerapan multikulturalisme berbeda-beda antar negara dapat mematumahnya dengan cara yang berbeda dari mayoritas. Namun, ketika melihat multikulturalisme secara keseluruhan, ada dua paradigma atau gagasan utama tentang integrasi budaya yang menonjol. Banyak orang menggunakan istilah "melting pot" dan "salad bowl" untuk menjelaskan sudut pandang ini. Prinsip utama multikulturalisme yang dikenal sebagai "teori wadah peleburan" (melting pot theory)

adalah gagasan bahwa komunitas-komunitas yang berbeda pasti akan berbaur satu sama lain, sehingga kehilangan identitas dan adat istiadat mereka di sepanjang jalan. Salah satu metafora umum untuk integrasi imigran ke AS adalah tempat peleburan pengecoran logam, tempat besi dan karbon digabungkan menjadi baja. Hipotesis ini sering digunakan untuk menggambarkan proses asimilasi di AS. Penentang model ini berargumentasi bahwa hal ini harus diamanatkan oleh pemerintah karena mengabaikan keberagaman, sehingga menyebabkan individu meninggalkan adat istiadat mereka. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Reorganisasi Indian AS tahun 1934, yang, meskipun terdapat keragaman budaya yang kaya di kalangan penduduk asli Amerika, memaksa sekitar 350.000 orang India diserap ke dalam budaya Amerika (Longley, 2018).

Lebih jauh lagi, berbeda dengan gagasan peleburan, teori mangkuk salad lebih permisif. Menurut hipotesis ini, peradaban yang beragam ada ketika individu-individu hidup berdampingan sambil melestarikan setidaknya beberapa ciri khas budaya asli mereka. Budaya yang berbeda digabungkan, seperti komponen salad, namun kualitas unik masing-masing elemen tetap terpisah satu sama lain alih-alih digabungkan untuk membentuk budaya tunggal yang homogen. Menurut gagasan salad bowl, seseorang tidak perlu melepaskan sejarah budayanya agar dapat diterima sebagai bagian dari budaya dominan. Di Amerika Serikat, Kota New York, dengan berbagai lingkungan etnis yang beragam seperti: Little India, Little Odessa, dan Chinatown dianggap sebagai contoh peradaban "mangkuk salad" (Longley, 2018).

### KESIMPULAN

Tipologi pemahaman antarbudaya diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu multikulturalisme deskriptif, multikulturalisme normatif, dan multikulturalisme dalam praktiknya. Multikulturalisme masyarakat global kita selalu dan akan terus dicirikan oleh apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai keragaman demografis atau deskriptif. Multikulturalisme sebagai norma adalah cara normatif dalam melihat dan bereaksi terhadap realitas multikultural, atau, menggunakan terminologi Heywood, multikulturalisme normatif. Multikulturalisme dalam praktiknya menggambarkan realitas objektif implementasi multikulturalisme normatif dalam kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat, berlawanan dengan realitas kodrat manusia yang multikultural.

### DAFTAR RUJUKAN

- Anthias, Floya. "Beyond Feminism and Multiculturalism: Locating Difference and the Politics of Location." *Women's Studies International Forum* 25, no. 3 (2002): 278.
- Arasaratnam. "A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years." *IJIR*, 2017.
- Arasaratnam, Lily A. "A Review of Articles on Multiculturalism in 35 Years of IJIR." *International Journal of Intercultural Relations* 37, no. 6 (2013): 677. <https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.006>.
- Bloemraad, Irene. "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy." Migration Policy Institute, 2011. <http://www.migrationpolicy.org/article/debate-over-multiculturalism-philosophy-politics-and-policy>.
- Calma, Tom. "Multiculturalism: A Position Paper by the Acting Race Discrimination Commissioner." *Sydney: Acting Race Discrimination Commissioner, Human Rights and Equal Opportunity Commission* 2 (2007).
- Clayton, J. "Multiculturalism as Diversity." *International Journal*, 2009, 211–215.
- Colombo, Enzo. "Multiculturalisms: An Overview of Multicultural Debates in Western Societies." *Current Sociology* 63, no. 6 (2015): 5.
- Eagleton, Terry. *Introduction to Ideology, Sociocultural Studies in Education: Critical Thinking for Democracy*. London and New York: Verso, 1991.
- Eldering, Lotty. "Multiculturalism and Multicultural Education in an International Perspective." *Anthropology and Education Quarterly* 27, no. 3 (1996): 315.

- Fries, Gingrich and. "Views on Multicultural Principles and Problems-Implications for Research and Policy." *Multicultural Discussion*, 2020.
- Fries, Paul Gingrich and Christopher J. "Views on Multicultural Principles and Problems- Implications for Research and Policy." *Canada: Global Model for a Multicultural State 4* (2002).
- Gale, Jessica, and Christian Staerklé. "Multiculturalism in Classically Liberal Societies: Group Membership and Compatibility between Individual and Collective Justice,." *Journal of Experimental Social Psychology* 85 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103877>.
- Gilroy, Paul. "Multiculturalism and Post-Colonial Theory." *The Oxford Handbook of Political Theory*, 2018, 1–17.
- Gutmann, A. "Multiculturalism and Identity Politics: Cultural Concerns." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2015.
- Hasa. "What Is the Difference Between Multiculturalism and Pluralism." Pediaa, 2020. <https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-multiculturalism-and-pluralism/#Multiculturalism>.
- Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction*. 3rd ed. Palgrave: McMillan, 2007.
- Hui, Bryant Pui Hung. "Facilitating Adaptation and Intercultural Contact: The Role of Integration and Multicultural Ideology in Dominant and Non-Dominant Groups." *International Journal of Intercultural Relations* 45 (2015): 70–84. <https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.01.002>.
- Jakubowicz, A, New South Wales, and Jeannie Martin. "State and Ethnicit: Multiculturalism as Ideology." *A.N.Z.J.S* 17, no. 3 (1981): 12.
- Jennifer L. Eagan. "Multiculturalism." *Encyclopædia Britannica*, August 1, 2020.
- Kymlicka, Will. *The Three Lives of Multiculturalism*. Rotterdam: Sense Publisher, 2015.
- Longley, Robert. "What Is Multiculturalism? Definition, Theories, and Examples." ThoughtCo, 2018. <https://www.thoughtco.com/what-is-multiculturalism-4689285>.
- Loobuyck, Patrick. "Liberal Multiculturalism." *Ethnicities, SAGE Publications* 5, no. 1 (2005): 109.
- Mannheim, Karl. "Kata Pengantar" *Dalam Ideology and Utopia an Introduction to the Sociology of Knowledge, Terj. Louis Wirth Dan Edward Shils*. London: Routledge and Kegan Paul, 1954.
- Mclaren, Peter. "Multiculturalism and the Postmodern Critique: Towards a Pedagogy Resistance and Transformation." *Cultural Studies* 7, no. 1 (1993): 118–146.
- Mennens, Ger. "Multiculturalism and Postmodernity: A Challenge to Our Political Structures." *Open Democracy*, 2011. <https://www.opendemocracy.net/en/multiculturalism-and-postmodernity-challenge-to-our-political-structures/%0AMulticulturalism>.
- Mombek, Zhanbolat Kosherbayev Aliya, Gulnar Kuzhagulova, and Nasipkhanym Kamalova Gulzhikhan Nurysheva Viacheslav Remizov. "Postmodernism: Theory and Practice of Multiculturalism in Europe." *Calitatea Vieții* 27, no. 2 (2016): 144–160.
- Moodley, Kogila. "Canadian Multiculturalism as Ideology." *Ethnic and Racial Studies* 6, no. 3 (1983): 329.
- Motani, Yoko. "The Role of Education in a Multicultural Society: The Theoretical Foundations of Mainstream Multiculturalism and Their Implications for Educational Policies." University of Toronto, 2001.
- Murphy, Michael. "Multiculturalism Oxford." *Oxford Bibliographies*, 2018. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0361.xml>.
- Ommundsen, Wenche. "Not the M-Word Again: Rhetoric and Silence in Recent Multiculturalism Debates." University of Wollongong, 2000. <https://ro.uow.edu.au/artspapers/309>.

- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multikulturalism: Keberagaman Budaya Dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- S, Benhabib. *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
- Slijper, Hans Vermeulen and Boris. *Nationalism, Regional Multiculturalism and Democracy*. Germany: Center for European Integration Studies, 2002.
- Song, Sarah. "Multiculturalism." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/multiculturalism/>.
- Staerke, Christian. "Policy Attitudes, Ideological Values and Social Representations." *Social and Personality Psychology Compass* 3, no. 6 (2009): 1096–1112.
- Stolle, Dietlind. "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes." *Canadian Journal of Political Science* 49, no. 2 (2016): 336.
- Tejo, Muhammad Nur Alam. "Dua Dayung Liberalisme Modern: John Rawls Dan Will Kymlicka." LSF Cogito, 2018. <http://lsfcogito.org/dua-dayung-liberalisme-modern-john-rawls-dan-will-kymlicka/>.
- Urbiola, Ana. "Valuing Diversity in Spain and Canada: The Role of Multicultural Ideology in Intergroup Attitudes and Intentions to Reduce Inequalities." *International Journal of Intercultural Relations* 56 (2017): 25. <https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.10.006>.
- Wahyudi, Agus. "Kritik Post Strukturalisme Terhadap Pendekatan Multikulturalisme." Universitas Gajah Mada, 2017. <https://sosialpolitik.filsafat.ugm.ac.id/kritik-post-strukturalisme-terhadap-pendekatan-multikulturalisme/>.
- Wieviorka, Michel. "Is Multiculturalism The Solution?" *Ethnic and Racial Studies* 21, no. 5 (2010): 881.
- . "The Re-Enchantment of Universal Values." *Ethnic and Racial Studies* 36, no. 12 (2013): 1946–1947.